

DAFTAR PUSTAKA

[Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 14 (e)].

Abdoerraoef. Al Quran dan Ilmu Hukum, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1986.

Abdul Haris Semendawai, Ferry Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Ita Omas, SH, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan. Memahami Whistle Blower, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Pusat, 2011.

Adami Chazawi. Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukuk dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Sinar Graha, Jakarta, 2010.

Ahmad Wardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

Andi Pangerang. Prinsip Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Implementasinya dalam Sistem Pemerintahan di Daerah, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, 1999.

Ashoshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Waluyo. Penegakan Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.

Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Denny Indrayana. Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Dwijjo Prayitno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT. Refika

Aditama, Bandung, 2013.

Firman Wijaya. Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta, 2012.

Friedrich Julius Stahl. Terpetik Dalam Muh. Tahir Ashary: Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.

H. Sulaiman Rasjid. Fiqh Islam, Attahirijah, Jakarta, 1954.

<http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html>

Ibnu' Athoillah Assukandary. Syarah Hikam, Risalah, Bandung, 1985.

Indriyanto Seno Adji. Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah dikutip dalam Dwinanto Agung Wibowo (Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia), Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Indriyanto Seno Adji. Urgensi Perlindungan Saksi,, www.antikorupsi.org. Des. 9, 2015.

Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah diperluas, www.antikorupsi.org1, Des. 28, 2012.

Kristian. Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Intergal (Intergal Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Lies Sulistiani. Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban, 2009.

Lilik Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Whitsleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime, PT. Alumni, Bandung, 2015.

M. Abdul Mujieb. Maburi Tholhah dan Syafi'ah (eds), Kamus Istilah Fiqih, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.

M. Nurul Irfan. Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2016.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 186.

Marbangun Hardjowirogo. Hak-hak Manusia, Yayasan Idayu, 1981.

Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Padjajaran, Bandung, 1997.

Muchamad Iksan. Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum Suatu Sru di tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam: Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.

Murtir Jeddawi. Negara Hukum Good Governance Dan Korupsi Di daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Paulus E. Lotulung. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982.

Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat

Manusia),

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Undang-Undang-tahun-1998-05-98%20(1).pdf. Jan 7, 2016.

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Subekti. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Wiyono. Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011.

Ramli Atmasasta. HAM dan Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, 1997.

Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.

Rhona K.M. Smith, Njal Hostmaelingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Ifdhal Kasim, Rudi M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah

Agus, Agung Yudhawiranata, Andrey Sudjatmoko, Antonio Pradjasto, Sri Wiyanti Eddyono, Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah (STID DI Al-Hikmah), Tadabbur Ayat Hijrah, <http://www.alhikmah.ac.id/2011/tadabbur-ayat-hijrah/>. Sept. 1, 2016.

Siswanto Sunarso. Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Siswanto Sunarso. Viktimologi dallam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Peneliatian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat, Jakarta, 2013.

St. Harum Pujiarto RS. Hak Asasi Manusia: Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ, Yogyakarta, 1999.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

WJS. Purwodarminto, 1959.